



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA – PD)
TAHUN 2016-2021**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

Jl. HOS Cokroaminoto No. 3 PEMALANG

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada. Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Renstra ini berisi tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Dalam penyusunan Renstra yang berisi nilai-nilai organisasi masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar penyusunan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan komitmen bersama untuk memudahkan pencapaian tujuan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita.

Ditetapkan di **Pemalang**
Pada tanggal Maret 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Drs. TUTUKO RAHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198603 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN PEMALAN NOMOR 050/ /2017 -	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	II-1
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	II-4
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	II-7
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-18
BAB III Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi	
3.1. Identifikasi Permasalahan.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	III-9
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-15

BAB IV	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan, Strategi dan Arah Kebijakan	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	IV-1
	4.2. Strategi dan Kebijakan	IV-2
BAB V	Rencana Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Indikatif	
	5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang – Perhubungan	V-1
BAB VI	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Mengacu pada RPJMD	VI-1
BAB VII	Penutup	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya	II-14
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021	IV-1
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-2
Tabel 4.3	Strategi dan Kebijakan	IV-5
Tabel 5.1	Penetapan Rencana Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan	V-6
	Tahun 2016~2021	
Tabel 6.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-2
Tabel 6.3	Indikator yang akan dicapai Dinas Perhubungan,	VI-2
	berdasarkan RPJM	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
4. PERJANJIAN KINERJA BIDANG ANGKUTAN
5. PERJANJIAN KINERJA BIDANG LALU-LINTAS
6. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT
7. PERJANJIAN KINERJA UTP I
8. PERJANJIAN KINERJA UTP II
9. PERJANJIAN KINERJA UTP PARKIR
10. PERJANJIAN KINERJA UTP PENGUJIAN
11. TABEL TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA OPD
12. FORMULIR RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR :050/104/2017
TANGGAL : 13 JUNI 2017

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN (RENSTRA) KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 - 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 151 dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra – Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis PD menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Jangka Menengah Pembangunan Nasional atau disebut juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun (Pasal 1 butir 7). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra – PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Pasal 25 ayat 2).

Penyusunan Renstra – PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 25 ayat 3).

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini digunakan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang antara lain meliputi : pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah proses penyusunan rencana yang mengacu pada penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati Pemalang terpilih pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode kerangka berfikir ilmiah oleh Dinas Perhubungan sebagai satuan kerja yang secara fungsional bertugas menangani masalah-masalah Perhubungan. Adapun pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah-masalah dalam lingkup tugas Dinas Perhubungan, antara lain : unsur pengusaha/dunia usaha, para tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas mendasarkan pada kebijakan pemerintah pada umumnya dan masukan dari masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Penyusunan Renstra-PD menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 15 ayat 3 didasarkan pada rancangan Renstra-PD yang disusun oleh Kepala PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya menurut pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditegaskan bahwa rancangan Renstra-PD dipergunakan sebagai masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). RPJM-Daerah yang telah ditetapkan kemudian menjadi dasar bagi PD untuk menyempurnakan Renstra PD sesuai dengan RPJM-Daerah. Hasil penyempurnaan Renstra PD berdasarkan acuan atau pedoman RPJM-Daerah ditetapkan dengan peraturan pimpinan PD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2010 bahwa Renstra PD berisi Pendahuluan; Gambaran Pelayanan PD; Isu-isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16),
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 67),
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

1.3. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan

kegiatan terkait urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021

2. Tujuan :

Renstra Dinas Perhubungan disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pemalang 2016-2021
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kab. Pemalang Tahun 2016 – 2021.
- d. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
- e. Mengakomodasi Program dan Kegiatan Percepatan/Akselerasi yang tertuang pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 pada Bab III, termasuk amanat SPM, RAD serta kebijakan sektoral pemerintah pusat dan provinsi lainnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 dan perubahannya adalah sebagai berikut :

I . PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
- 1.2 Strategi dan Kebijakan PD

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan

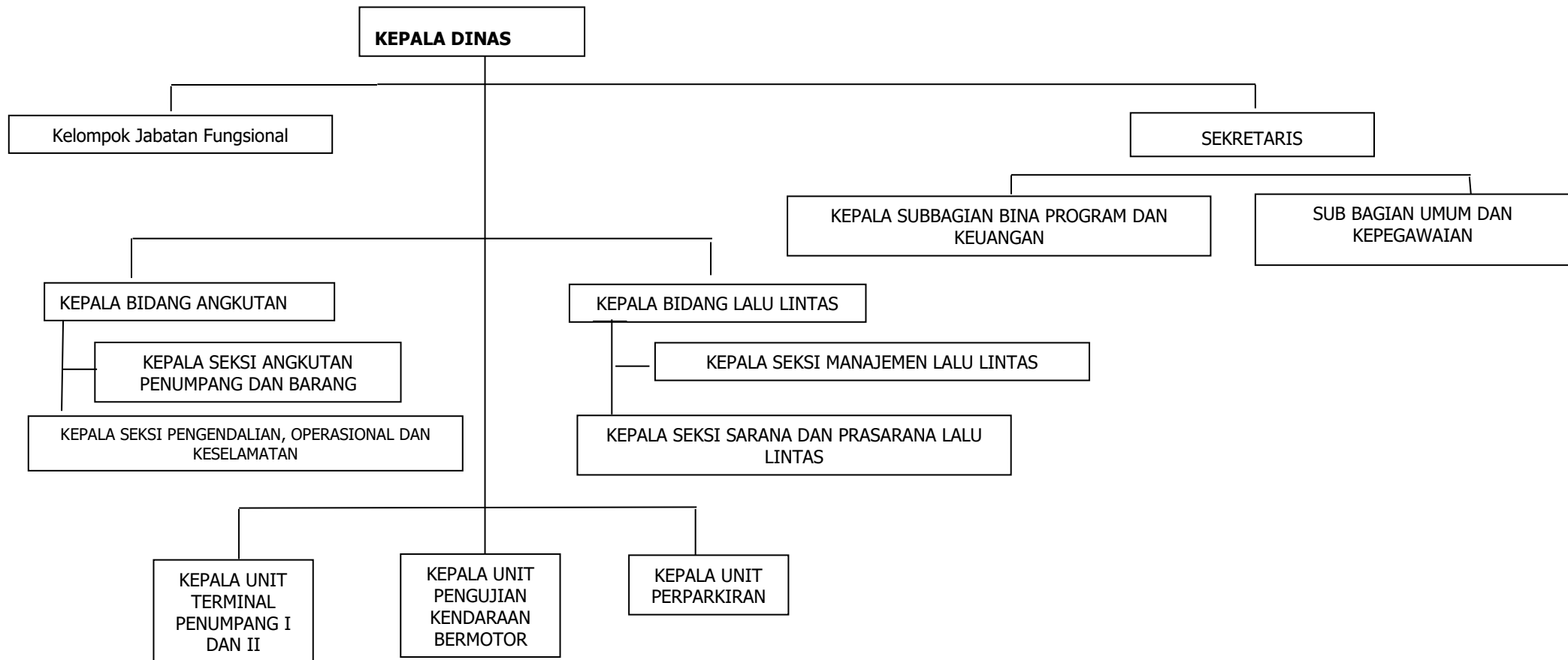
desentralisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang adalah bidang perhubungan;

4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang pada Bagian Keempat Pasal 15, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Bina Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Penumpang dan Barang;
 - 2) Seksi Pengendalian, Operasional dan Keselamatan;
- d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
- e. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - 1) Unit Terminal Penumpang I;
 - 2) Unit Terminal Penumpang II;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Perparkiran.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan Struktur
Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang**



2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

1. Sumber Daya Manusia

Per 20 Maret 2017, Personil pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan struktur :

1) Jumlah Struktural :

- a) Eselon II/B : 001 orang
- b) Eselon III/A : 003 orang
- c) Eselon III/B : 00- orang
- d) Eselon IV/A : 010 orang

2) Jumlah Fungsional :

- Penguji Kendaraan Bermotor : 004 orang

3) Jumlah Pelaksana :

- Pelaksana : 82 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari :

- 1) Pembina Tingkat I (IV/b) : 01 orang
- 2) Pembina (IV/a) : 07 orang
- 3) Penata Tingkat I (III/d) : 05 orang
- 4) Penata (III/c) : 03 orang
- 5) Penata Muda Tingkat I (III/b) : 07 orang
- 6) Penata Muda (III/a) : 03 orang
- 7) Pengatur Tingkat I (II/d) : 04 orang
- 8) Pengatur (II/c) : 10 orang
- 9) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 20 orang
- 10) Pengatur Muda (II/a) : 13 orang
- 11) Juru Tingkat I (I/d) : 11 orang
- 12) Juru (I/c) : 05 orang
- 13) Juru Muda Tingkat I (I/b) : 6 orang
- 14) Juru Muda (I/a) : 1 orang

- c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :
- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| 1) Sarjana Strata 3 | : | - |
| 2) Sarjana Strata 2 | : | 05 orang |
| 3) Sarjana Strata 1/Diploma IV | : | 13 orang |
| 4) Diploma III | : | 07 orang |
| 5) Diploma II | : | 02 orang |
| 6) SLTA | : | 29 orang |
| 7) SLTP | : | 23 orang |
| 8) SD | : | 16 orang |
- d. Berdasarkan lokasi tugas, terdiri dari :
- | | | |
|--------------------|---|----------|
| 1) Kantor | : | 45 orang |
| 2) Terminal | : | 39 orang |
| 3) Perparkiran | : | 06 orang |
| 4) Perlintasan KA | : | 20 orang |
| 5) Menara Repeater | : | 0- orang |
- e. Sedangkan Tenaga/Pegawai Honorer pada Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|---|----------|
| 1) Petugas Kebersihan di Terminal | : | 03 orang |
| 2) Tenaga Karya Bhakti di Terminal | : | 01 orang |
| 3) Petugas Kantor | : | 02 orang |
| 4) Petugas Terminal | : | 04 orang |
| 5) Petugas Parkir | : | 15 orang |
| 6) Perlintasan KA | : | - orang |

Dari keseluruhan pegawai (PNS) sebanyak 95 orang dan jumlah Tenaga Honorer sebanyak 25 orang, bertugas di Kantor Dishub pada Sekretariat dan Bidang-bidang : Perhubungan Darat dan Laut, Teknik Sarana Prasarana Perhubungan; pada Unit Terminal Penumpang (UTP) Pemalang : Terminal Induk Pemalang, Terminal Angkot Pemalang, Terminal Petarukan, dan Terminal Comal; pada Unit Terminal Penumpang (UTP) Randudongkal : Terminal Randudongkal, Terminal Moga, Terminal Belik, dan

Terminal Warungpring; Perparkiran : Task Force ParkirTepi Jalan dan Pos Jaga Perlintasan KA.

Apabila dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, maka SDM Dinas Perhubungan sangat tidak representatif, dimana 72,63 % pegawai bergolongan II dan I, dan 71,57% berpendidikan SD – SLTA.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja aparat/petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang didukung dengan adanya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana tersebut diantaranya Alat Uji untuk Pengujian Kendaraan Bermotor. Selain itu juga beberapa set komputer sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan prasarana yang ada berupa Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Gedung Kantor Pelayanan Administrasi, dan Gedung Terminal.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan, didukung sebagai berikut :

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer	35 unit
2	Laptop	14 unit
3	LCD	0- unit
4	Telepon	1 unit
	Mesin Fax	01 unit
	Instalasi Telepon, Fax, PABX	01 unit
5	Televisi	01 buah
6	AC	12 buah
7	Almari	01 buah

No	Jenis	Jumlah
8	Meja Kerja Eselon II	01 buah
9	Meja dan Kursi Kerja	55 buah
10	Kursi Rapat	40 buah
11	Meja dan Kursi Tamu	06 set
12	Mesin Tik	08 buah
13	Filling Cabinet	24 buah
14	Kendaraan Roda-4	6 buah
15	Kendaraan Roda-2	16 buah
16	Tape Recorder/Wireless	02 buah
17	Amplifier/Karaoke	01 set
18	Kamera Digital	0- buah
19	Pesawat HT + Rig	11 unit
20	Brankas	01 buah
21	Proyektor	-buah
22	Alat Pengujian Kendaraan :	0 1 set
	<ul style="list-style-type: none"> a. Smoke Tester b. Axle Play Detector c. Slide Slip Tester d. Axle Load Meter e. Head Light Tester f. Brake Tester g. Speedometer Tester 	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas pokok "*Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perhubungan*", oleh karena itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Hariharjo harus memberikan pelayanan umum sebaik-baiknya kepada masyarakat baik pelayanan administratif maupun pelayanan-pelayanan teknis guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan yang dapat diberikan Dinas Perhubungan Pemalang meliputi :

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang telah menyediakan pelayanan Angkutan Umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan dan jaringan trayek berupa Angkutan Perkotaan (137 kendaraan dalam 10 trayek), Angkutan Perdesaan (325 kendaraan dalam 20 trayek), Angkutan Perbatasan (30 kendaraan dalam 3 trayek). Selain itu juga tersedia bus yang melayani antar kota berupa Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP).

Perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang terdiri dari Izin Trayek dan Izin Insidentil. Angkutan Umum dalam trayek yang ada di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

1) Angkutan Perkotaan

No	Trayek	Jumlah
1.	A : Terminal Induk – Sumberharjo PP	11
2.	B : Terminal Induk – Petarukan PP	26
3.	C : Terminal Induk – Widuri PP	6
4.	D : Terminal Induk – Sumberharjo PP	9
5.	E : Terminal Induk – Petarukan PP	25
6.	F : Terminal Induk – Sungapan PP	16
7.	G : Terminal Induk – Banjarmulya PP	10
8.	G1 : Terminal Induk – Banjarmulya PP	13
9.	H : Terminal Induk – Loning PP	0 14
10.	I : Terminal Induk – Jebed PP	15

2) Angkutan Perdesaan

No	Trayek	Jumlah
Berpusat di Petarukan :		
1.	Petarukan – Karangasem – Comal PP	11
2.	Klareyan – Petarukan – Pener PP	21
Berpusat di Comal :		
1.	Comal – Tegalsari – Banjardawa PP	18
2.	Comal – Kaliwadas – Cikadu PP	20
3.	Comal – Pesantren – Petarukan PP	25
4.	Comal – Kaliprau – Blendung PP	15
5.	Comal – Pamutih – Blendung PP	10
6.	Comal – Mojo – Blendung PP	15
7.	Comal – Kebojongan PP	06
Berpusat di Randudongkal :		
1.	Randudongkal – Tanahbaya PP	29
2.	Randudongkal – Bantarbolang PP	10
3.	Randudongkal – Watukumpul PP	10
4.	Randudongkal – Warungpring PP	33
5.	Randudongkal – Belik – Cikadu PP	25
6.	Randudongkal – Kecepit – Moga PP	22
Berpusat di Moga :		
1.	Moga – Karangasari – Simpat PP	10
2.	Moga – Pulosari – Belik PP	0 8
3.	Moga – Mandiraja – Warungpring PP	19
Berpusat di Bantarbolang :		
1.	Bantarbolang – Ps Pagi PP	12
2.	Bantarbolang – Kesesirejo PP	10

Disamping telah tersedia angkutan umum dalam trayek, di Kabupaten Pemalang terdapat angkutan tidak dalam trayek yang melayani daerah-daerah terpencil (pegunungan) dengan daerah-daerah yang telah berkembang (ibukota kecamatan) berupa kendaraan angkutan barang. Hal ini karena kultur/kebiasaan masyarakat setempat yang masih membutuhkan angkutan barang/multifungsi sebagai angkutan penumpang sekaligus barang.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menyediakan prasarana/fasilitas angkutan jalan berupa : halte dan terminal.

Jumlah shelter dan halte sebanyak 23 buah (3 shelter dan 15 halte). Sedangkan jumlah terminal penumpang yang ada sebanyak 8 buah, terdiri dari :

- 2 buah Terminal tipe-B (Randudongkal dan Moga);
- 5 buah Terminal tipe-C (Belik, Warungpring, Angkot Pemalang, Petarukan, dan Comal)
- 1 buah Terminal grosir Comal;

Agar dapat tetap berfungsi dengan baik, dilaksanakan kegiatan pemeliharaan terminal dan peningkatan fungsi terminal.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Guna mendukung keselamatan transportasi jalan, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Pengadaan Marka Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian, Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Pemeliharaan shelter dan halte .

Fasilitas perlengkapan jalan yang telah dipasang Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang baik di jalan Kabupaten, jalan Provinsi, maupun jalan Nasional adalah terdiri dari :

- Rambu Lalu Lintas
- Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan
- Delineator
- Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)
- Marka Jalan
- Traffic Light (APILL) dan Countdown Timer
- Warning Light
- Papan Nama Jalan
- Rambu Petunjuk Jalur Alternatif
- Shelter

- Halte

Selain kegiatan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, mengingat masih adanya kekurangan atau hal-hal yang harus dilakukan, antara lain :

- sudah pudar/hilangnya marka jalan dan *zebracross*, terutama yang terdapat di jalan-jalan protokol ibukota kabupaten dan di depan sekolah-sekolah;
- kurang tertibnya parkir yang ada di badan jalan, di jalan-jalan protokol yang melalui kawasan/pusat perdagangan di ibukota kabupaten;
- masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas untuk jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Pemalang, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pemalang bagian Selatan yang berupa dataran tinggi banyak memerlukan rambu lalu lintas sebagai petunjuk dan peringatan bagi para pengguna jalan demi keamanan dan keselamatan berlalu lintas;
- Hilangnya beberapa rambu lalu lintas yang telah dipasang, karena kurangnya pengertian masyarakat akan arti pentingnya rambu lalu lintas bagi pengguna jalan.
- Masih banyak dibutuhkan pengaman jalan khususnya di wilayah bertebing curam dan tanjakan maupun penurunan jalan yang tajam.

d. Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui kondisi laik/tidaknya kendaraan bus/barang yang akan beroperasi di jalan dan sebagai kelengkapan kendaraan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang memberikan pelayanan teknis berupa Pemeriksaan/Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di wilayah Kabupaten Pemalang pada Tahun 2016 sudah mencapai 11.882

lebih kendaraan. Oleh karena itu, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan prasarana berupa 1 gedung balai pengujian kendaraan bermotor, sarana berupa 9 set alat pengujian kendaraan bermotor dan 1 (satu) Unit Smoke tester (COHC). Untuk menjamin kelancaran dan keakuratan peralatan uji tersebut, dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji, dan pemeliharaan balai pengujian kendaraan bermotor.

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menunjang pelayanan bidang perhubungan pada umumnya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan handal agar dapat memberikan pelayanan lebih baik. Jumlah SDM bidang perhubungan, berdasarkan SPM ini terdiri dari :

- 1) Bidang Terminal : dari 8 unit terminal yang ada, SDM yang bertugas pada lokasi terminal sebanyak 43 orang;
- 2) Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor. Pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor SDM yang ada terdiri dari 4 orang Penguji, 1 orang petugas Administrasi, dan 5 orang petugas Pendukung Teknis Pengujian.
- 3) Bidang MRL, Evaluasi Andalalin, dan Pengelolaan Parkir terdiri dari : 4 orang yang bertugas dalam bidang MRL dan Evaluasi Andalalin, dan 4 orang yang bertugas pada Pengelolaan Parkir.
- 4) Pengawas Kelaikan Jalan. SDM yang bertugas sebagai pengawas kelaikan jalan berjumlah 2 orang, sayangnya masih belum memiliki kompetensi dalam hal pengawasan kelaikan jalan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pelatihan teknis untuk diklat PPNS bidang Perhubungan.

f. Keselamatan

Saat ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya belum menetapkan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek yang ada.

2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penetapan rencana tingkat capaian (target) yang merupakan gambaran mengenai kinerja diinginkan. Penggunaan kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa **Formulir PKK** (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan **Formulir PPS** (Pengukuran Pencapaian Sasaran).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, untuk Tahun 2017 Dinas Perhubungan menetapkan 6 (enam) sasaran dengan melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2018 untuk mencapai 6 (enam) sasaran tersebut.

Capaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pendanaan Pelayanan PD
Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang Jaya

Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya											Kondisi Akhir Periode 2021	Perangkat Daerah yang mengampu	Nama Program Prioritas Bupati	
				2016		2017		2018		2019		2020		2021				
				Kinerja	000	Kinerja	000	Kinerja	000	Kinerja	000	Kinerja	000	Kinerja				000
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan					235,350		7,500,000		10,000,000		7,500,000		7,500,000		2,500,000	35,235,350	PD Perhubungan	Penyiapan Bandara Perintis
Jumlah Terminal Bis	Unit	Jumlah Terminal Bis	8	8		8		8		8		8		8		8		
Jumlah Terminal Barang	Unit	Jumlah Terminal Barang	0	0		0		1		1		1		1		1		
Jumlah Terminal yang beroperasi	Unit	Jumlah Terminal yang beroperasi	8	8		8		9		9		9		9		9		
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Kelompok	Menunjukkan presentase ketersediaan terminal angkutan penumpang dibanding jumlah kebutuhan	8/8	8/8		6/6		6/6		6/6		6/6		6/6		6/6		
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ					1,808,157		315,000		330,750		347,288		364,652		382,884	3,548,731	PD Perhubungan	

Jumlah kasus pelanggaran angkutan barang dan angkutan penumpang	Kasus	Jumlah kasus pelanggaran angkutan barang dan angkutan penumpang	110	951		900		840		800		759		690		690		
Presentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	Rasio jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan sarana dan prasarana perhubungan yang ada	90	90		90		91		92		93		94		95		95
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					242,600		370,100		450,000		490,000		540,000		540,000	2,642,700	PD Perhubungan	
Presentase ketersediaan angkutan kota	%	Perbandingan antara jumlah angkutan kota dengan jumlah penumpang	18.5	25.538		25.261		24.928		24.743		24.502		24.244		24.244		
Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	%	Menunjukkan ketersediaan angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia jaringan jln Kabupaten/Kota, jml angkutan umum 602 unit, jumlah jaringan trayek 33 jaringan	602/33	602/33		602/33		602/33		602/33		602/33		602/33		602/33		

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	Prosentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang terhadap jumlah total jaringan trayek dalam suatu Kabupaten/Kota. Jumlah trayek yang sudah ada adalah 33 jaringan trayek	33	33		33		33		33		33		33			
Jumlah orang melalui/masuk terminal per Tahun	orang	Menunjukkan banyaknya orang melalui/masuk terminal per tahun	2,265,400	3,128,517		3,094,536		3,053,759		2,265,400		3,001,655		3,001,655			33
Persentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus Uji emisi)	%	Merupakan perbandingan kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (Lulus uji emisi) dengan Jml Kendaraan	35	40		45		50		55		60		65			65

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					100,00 0		550,000		550,000		550,00 0		550,00 0		550,000	2,850,000	PD Perhubungan	
Persentase tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	Menunjukkan persentase jumlah halte pada trayek yang telah dilayani angkutan umum	23.33	73.33		106.67		140		173.33		206.67		206.67		240		
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%		0	0		0		20		40		60		60		100		
Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas					1,064,3 70		587,000		550,000		600,00 0		650,00 0		650,000		PD Perhubungan	
Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	Prosentase perbandingan antara jumlah rambu-rambu yang ada dengan jumlah rambu-rambu seharusnya	35	36		40		44		49		55		60		60		
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota	%	Menunjukkan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pd jln Kab/Kota	35	36		40		44		49		55		60		60		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu lima tahun kedepan, perlu mengetahui tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Kekuatan

- a. Tersedianya peralatan pada bidang pengujian yang sudah memadai
- b. Tersedianya terminal angkutan penumpang sebanyak 8 terminal
- c. Sarana dan prasarana perlengkapan jalan cukup memadai
- d. Sudah tersedianya jaringan antar PD

2. Kelemahan

- a. Terbatasnya jumlah personil ASN yang memiliki kompetensi PPNS;
- b. Masih kurangnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Masih kurangnya kualitas manajemen pengaturan lalu lintas dan rendahnya disiplin pengguna jalan;
- d. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum antar wilayah bagi masyarakat;
- e. Pelayanan Uji kendaraan bermotor belum optimal;
- f. Kondisi fisik dan fasilitas gedung kantor kurang memadai, karena kurang mencukupinya anggaran pemeliharaan gedung kantor.

3. Tantangan

- a. Keberhasilan dengan adanya terminal-terminal, meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya transportasi sehingga memudahkan

masyarakat untuk melakukan aktivitas sebagai penunjang peningkatan ekonomi, namun hingga saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang belum bisa menyediakan sarana dan prasarana terminal yang diinginkan masyarakat.

4. Peluang

- a. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengalokasikan anggaran.
- b. Pengembangan manajemen dan meningkatkan SDM yang kompeten serta penegelolaan keuangan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
- c. Adanya kebijakan Nasional yang mendukung program-program sarana prasarana perlengkapan/keamanan jalan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Secara umum permasalahan transportasi di Kabupaten Pemalang tidak banyak berbeda dengan daerah lain. Permasalahan transportasi pada umumnya menyangkut infrastruktur, aksesibilitas, isu lingkungan, keselamatan, pelayanan angkutan umum, efisiensi dan efektivitas, dan kesenjangan pelayanan serta prasarana antar wilayah. Secara rinci permasalahan-permasalahan di bidang transportasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perhubungan

Permasalahan yang muncul pada bidang perhubungan adalah :

- a. Terbatasnya jumlah personil ASN yang memiliki kompetensi PPNS;
- b. Kondisi fisik dan fasilitas gedung kantor kurang memadai, karena kurang mencukupinya anggaran pemeliharaan gedung kantor;
- c. masih kurangnya kualitas manajemen pengaturan lalu lintas dan rendahnya disiplin pengguna jalan;
- d. masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum antar wilayah bagi masyarakat;
- e. tingginya beban lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan yang padat dan banyaknya daerah rawan kecelakaan antar moda bercampur (truk, becak, dokar), dari pusat jalur pantura masih bercampur;
- f. belum diimplementasikan tatanan transportasi lokal (tatralok) sebagai tindak lanjut masterplan transportasi;
- g. Pelayanan Uji kendaraan bermotor belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah :

“ Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera.”

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu :

- a. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.
- b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotongroyong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
- c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

- d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal.
- e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Misi

Pencapaian visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera" ditempuh melalui 7 (tujuh) misi adalah :

1. Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan dari semua tingkatan dengan mengedepankan prinsip pembangunan partisipatif dan gotong royong
2. Mewujudkan kesempatan dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan
3. Meneguhkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, kelautan, perdagangan serta usaha kecil dan menengah (UKM) serta upaya penanggulangan kemiskinan
4. Mewujudkan sarana dan prasarana dasar yang merata untuk memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, dan reformasi sistem yang bebas korupsi, bermartabat serta memberikan kemudahan investasi dalam upaya meningkatkan daya saing daerah
6. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkokoh kepribadian bangsa

7. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memperkokoh kebhinekaan dengan mengembangkan norma kehidupan beragama yang toleran, harmonis dan saling menghormati dengan didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah merupakan pernyataan yang merupakan program kepala daerah Kabupaten Pemalang yang berisi program prioritas yang bersifat strategis, yang terdiri dari:

1. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan
2. Pendirian Rumah Sakit Pratama di Comal dan Randudongkal
3. Pembangunan Kawasan Wisata
 - a. Mangrove di Mojo Ulujami
 - b. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal
 - c. Pemandian Moga, dengan infrastruktur pendukung.
 - d. Desa Wisata (Cikendung, Sikasur, Gombang, Banyumudal, Sima, Kaliprau, Mojo, Pegongsoran, Penggarit, Nyamplungsari, Blendung, Kertosari, Pedagung, dan Desa Surajaya)
 - e. Pembangunan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet
4. Pendirian Pusat Layanan Usaha Terpadu
5. Pengembangan Agropolitan:
 - a. Agropolitan Durian (Warungpring),
 - b. Agropolitan Mangga Istana (Asem Doyong, Penggarit, Widuri, Danasari)
 - c. Nanas (Waliksarimadu)
6. Budidaya Padi Teknologi Salibu (Ampelgading)
7. Pengembangan Minapolitan
 - a. Tasikrejo, Kaliprau, Ketapang, Mojo, Pesantren, Limbangan (Kec. Ulujami)
 - b. Lawangrejo, Sugihwaras (Kec. Pemalang)
8. Pengembangan Kawasan Pedesaan (Waliksarimadu)

9. Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kerbau di Desa Peguyangan, Kec. Bantarbolang dan SPR Sapi Potong di Kecamatan Watukumpul dan Belik.
10. Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Nyamplung Sari dan Mojo
11. RTH di masing-masing Kecamatan dengan kelengkapan *Hotspot area*.
12. Pengembangan Peternakan di Kawasan Penghasil Telur Omega (Klarean, Sarwodadi)
13. Pembangunan pasar pagi dan pasar unggas.
14. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
15. Pengembangan BLK dan Pembangunan Technopark
16. Pembangunan Masjid Agung Pemalang
17. Revitalisasi Pasar-pasar daerah
18. Pembangunan jalan-jalan beton (*Rigid Pavement*)
19. Penataan Ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
20. Pembangunan PLTU Kabupaten Pemalang
21. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
22. Pembangunan Pusat Pengembangan Informatika dan Desa (PUSPINDES)
23. Pembangunan Bandara Perintis.
24. Pembangunan Gedung DPRD
25. Pembangunan Rumah Budaya
26. Penyediaan Air Bersih
27. Pembangunan *Sport Centre*

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Misi Bupati Pemalang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan Kabupaten Pemalang adalah pada misi keempat dan keenam yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

- b. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Pemalang 2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan, sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan; Lingkup kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perhubungan kabupaten Pemalang berkewajiban dan sejalan dengan misi Bupati Pemalang yang ke 4 (Empat) yaitu " *Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah* " sangat terkait dengan fungsi Dinas Perhubungan yaitu Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat Dengan Meningkatkannya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat, maka program pembangunan yang mendukung misi keempat ini adalah:

1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - b. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan;
 - c. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - d. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;
 - e. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat;
 - f. Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan;
 - g. Inventarisasi data sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - h. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
2. Program Peningkatan Pengelolaan Angkutan, meliputi kegiatan :
 - a. Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang;
 - b. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan;
 - c. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang;
 - d. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya;
 - e. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal;
 - f. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum;
 - g. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal A;
 - h. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan;

- i. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan;
- j. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan;
- k. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
- l. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
- m. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal B.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Kabupaten Pemalang 2016 -2021, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai ukuran keberhasilan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang pada periode 2016-2021 selain dijiwai oleh harapan terwujudnya masyarakat Pemalang yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya di masa mendatang. Isu strategis yang dihadapi terorientasi pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

1. Telaah Renstra Kementrian

a. Kementrian Perhubungan

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 adalah "Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah." Ditindaklanjuti dengan pernyataan misi :

- 1) Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional;
- 2) Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan;
- 3) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Adapun tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat, dengan strategi pembangunan transportasi nasional Tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Perencanaan Terpadu antara Pemerintah Pusat dengan Pemda
- 2) Pelibatan Pemda/BUMN/ Swasta
- 3) Kompetensi & Profesionalisme SDM

- 4) Mengutamakan aspek keselamatan keamanan, kehandalan
- 5) Pembangunan transportasi dengan skema multi year
- 6) Mengutamakan aspek kelestarian lingkungan

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari hasil telaah Renstra Kementerian Perhubungan 2015-2019 yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Pemalang adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan jasa transportasi untuk mewujudkan konektivitas nasional; hal ini selaras dengan rencana pembangunan terminal angkutan barang, rencana pembangunan pelabuhan dan bandara perintis
- 2) Peningkatan Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan; misi ke dua kementerian perhubungan ini sejalan dengan rencana pembuatan Kawasan Tertib Lalu lintas.

Adapun permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran K/L beserta faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan sebagai berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum tercapainya target Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas	Adanya dana DAK keselamatan transportasi darat

		Jumlah kecelakaan lalu-lintas yang meningkat	Angkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi	Koordinasi antar stake holder transportasi dalam forum LLAJ
2.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Kerusakan jalan, disebagian wilayah akibat kelebihan muatan oleh kendaraan barang	Keterbatasan sarana dan prasarana	Komintmen Pemda : kerjasama dengan Dinhubkominfo Prov. Jawa Tengah

2. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jawa Tengah. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi ke enam dan ke tujuh yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan, Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, melalui pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan gubernur No. 75 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan.

Tugas Pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan, sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Misi Kepala Daerah yang ke 4 (Empat) yaitu “ Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah” sangat terkait dengan fungsi dan tugas Dinas Perhubungan yang ke 2 (Dua) yaitu Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, fungsi dan tugas yang ke 4 (Empat) yaitu Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas jalan dan kelaikan kendaraan, angkutan jalan, pengendalian operasional dan keselamatan jalan, angkutan sungai, danau penyeberangan, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara dan fungsi dan tugas yang ke 5 (lima) yaitu Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan.

Permasalahan pelayanan PD berdasarkan sasaran Renstra Provinsi beserta faktor penghambat atau pendorong keberhasilan penanganannya sebagai berikut:

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di Jawa Tengah	Kerusakan jalan disebagai wilayah akibat kelebihan muatan oleh kendaraan barang	Keterbatasan sarana dan prasarana	Komitmen Pemda : kerjasama dengan Dinhub Provinsi Jawa Tengah
		Belum tercapainya taget Nasional Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas	Adanya dana DAK keselamatan transportasi darat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW Kabupaten Pemalang yang sudah ditetapkan akan mengarah pembangunan di Kabupaten Pemalang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna berhasil guna serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Permasalahan pelayanan PD berdasarkan telaah Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagai berikut :

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelaksanaan Pembuatan Kawasan Tertib Lalu-lintas	Belum lengkapnya sarana prasarana perhubungan	Anggaran untuk melengkapi sarana prasarana cukup tinggi	Merupakan salah satu program unggulan Dishub
2.	Rencana Pembangunan Terminal Angkutan Barang	Masih dalam proses DED	Anggaran untuk DED masih dalam proses	Anggaran DED pembangunan terminal Barang telah disetujui
3.	Rencana Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Masih dalam proses penentuan anggaran	Besarnya anggaran untuk pembangunan pelabuhan pengumpan regional	Merupakan salah satu program prioritas Kepala Daerah (Bupati)
4.	Rencana Pembangunan Bandara Perintis	Masih dalam proses penentuan anggaran	Besarnya anggaran untuk pembangunan bandara perintis	Merupakan salah satu program prioritas Kepala Daerah (Bupati)
5.	Pembangunan terminal type C	Belum ditindaklanjuti	Konsidi pelayanan	Simpul terminal telah

		nya pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Pulosari	angkutan umum yang menurun	ada sebelumnya
6.	Pengadaan sarana prasarana lalu- lintas	Kerusakan rambu-rambu lalu lintas akibat sudah cukup tua	Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas	Adanya dana DAU keselamatan transportasi darat

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis, Memuat Faktor-faktor dari Pelayanan Dinas Perhubungan yang Mempengaruhi Permasalahan Pelayanan PD

Dari hasil capaian terhadap Renstra PD, maka permasalahan yang muncul pada bidang Perhubungan adalah :

- Terbatasnya jumlah personil ASN yang memiliki kompetensi PPNS;
- Kondisi fisik dan fasilitas gedung kantor kurang memadai, karena kurang mencukupinya anggaran pemeliharaan gedung kantor;
- masih kurangnya kualitas manajemen pengaturan lalu lintas dan rendahnya disiplin pengguna jalan;
- masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum antar wilayah bagi masyarakat;
- tingginya beban lalu lintas akibat peningkatan jumlah kendaraan yang padat dan banyaknya daerah rawan kecelakaan antar moda bercampur (truk, becak, dokar), dari pusat jalur pantura masih bercampur;
- belum diimplementasikan tatanan transportasi lokal (tatralok) sebagai tindak lanjut masterplan transportasi;
- Pelayanan Uji kendaraan bermotor belum optimal.

Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

- Penyediaan infrastruktur perhubungan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten;
- Rencana pembangunan mega proyek di Kabupaten Pematang terminal angkutan barang, pelabuhan pengumpan regional dan bandara perintis;
- Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan dan Sasaran merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

4.2. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran 1 (*Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat*), yaitu :

- a. Meningkatkan pengelolaan perparkiran
- b. Meningkatkan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan sarana dan prasarana perlengkapan jalan
- c. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan
- d. Meningkatkan pelayanan perizinan angkutan umum
- e. Meningkatkan ketertiban lalu lintas dan keselamatan transportasi

Strategi untuk mencapai sasaran 2 (*Meningkatnya kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor*), yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
- b. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

Strategi untuk mencapai sasaran 3 (*Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan*), yaitu :

- a. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan terminal
- b. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan shelter dan halte
- c. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan alat pengamanan perlintasan sebidang

Strategi untuk mencapai sasaran 4 (*Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*), yaitu :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana publik
- b. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan bintek bagi aparatur perhubungan
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan dan pembangunan
- d. Meningkatkan pelayanan angkutan dan terminal

2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran 1 (*Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat-*), yaitu :

- a. Peningkatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- b. Peningkatan pengelolaan perparkiran.
- c. Peningkatan pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan, dan sarana dan prasarana perlengkapan jalan.
- d. Peningkatan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan
- e. Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum
- f. Peningkatan ketertiban lalu lintas dan keselamatan transportasi

Arah Kebijakan untuk mencapai 2 (*Meningkatnya kualitas pelayanan jasa teknis pemeriksaan kendaraan bermotor*), yaitu :

- a. Peningkatan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor
- b. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

Arah Kebijakan untuk mencapai 3 (*Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan*), yaitu :

- a. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan terminal
- b. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan shelter dan halte
- c. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan alat pengamanan perlintasan sebidang

Arah Kebijakan untuk mencapai sasaran 4 (*Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah*), yaitu :

- a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik.
- b. Peningkatan pelatihan dan bintek bagi aparatur perhubungan,
- c. Peningkatan pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- d. Peningkatan pelayanan angkutan dan terminal.

Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung Terminal;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Pengadaan Marka Jalan;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan;
 - d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan;
 - e. Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan Pembangunan bidang Perhubungan

Program dan kegiatan bidang Perhubungan yang akan dilaksanakan adalah:

1. Prograam Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional;
 - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - i. Penyediaan Komponen/Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;
 - m. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - n. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - o. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah;
 - p. Penyediaan Jasa Keamanan;
 - q. Rapat-rapat Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 - d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - e. Pengadaan Mebeler;

- f. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya;
 - g. Pengadaan Alat-alat Elektronik;
 - h. Pengadaan Peralatan Kerja;
 - i. Pengadaan Lemari Besi dan Feling Cabinet;
 - j. Pembangunan Tempat Parkir dan Area Publik Kantor;
 - k. Pembangunan Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor;
 - l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 - p. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler;
 - q. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan perlengkapan;
 - r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Elektronik;
 - s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja;
 - t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Lemari Besi dan Feling Cabinet;
 - u. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Parkir dan Area Publik Kantor;
 - v. Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pembatas Lingkungan Kantor;
 - w. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor;
 - x. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional;
 - y. Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Sistem Informasi
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD
 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
 - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- a. Penyusunan Data Base Perencanaan SKPD;
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
 - c. Penyusunan Data Base Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tingkat Kabupaten
7. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
- a. Perencanaan Pembangunan Perasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - b. Penyusunan kebijakan, norma, standar, dan prosedur bidang perhubungan;
 - c. Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - d. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan;
 - e. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat;
 - f. Peningkatan pengelolaan parkir di tepi jalan;
 - g. Inventarisasi data sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan;
 - h. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
- a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan;
 - d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - e. Rehabilitasi/pemeliharaan Marka Jalan;
 - f. Rehabilitasi/pemeliharaan Pagar Pengamanan Jalan;
 - g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte;
 - h. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlintasan KA.
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :

- a. Kegiatan Penyuluhan bagi para Sopir/juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang;
 - b. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan;
 - c. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang;
 - d. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya;
 - e. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal;
 - f. Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum;
 - g. Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A;
 - h. Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah;
 - i. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan;
 - j. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan;
 - k. Fasilitasi Perizinan di bidang Perhubungan;
 - l. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan;
 - m. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
 - n. Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B.
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
- a. Pembangunan Gedung Terminal;
 - b. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal;
 - c. Pembangunan Jembatan Penyebrangan Gedung Terminal;
 - d. Pembangunan Sarana Parkir;
 - e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.
11. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, yaitu dengan melaksanakan kegiatan :
- a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. Pengadaan Marka Jalan;

- c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan;
- e. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas di Jalan;
- f. Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Tabel 5.1.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 ~ 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
							2016		2017		2018		2019		2020					2021 (Prediksi N+1)	
							Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan	Target	Rp Jutaan				Target	Rp Jutaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat		Meningkatkannya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LAKIP Dishub	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
				Penyediaan jasa surat menyurat	3000 surat	3.500 surat 12 bulan	9.9	3.500 surat, 12 bulan	12	3500 surat, 12 bulan	13	3500 surat, 12 bulan	15	3500 surat, 12 bulan	16	3500 surat, 12 bulan	18	17.500 surat, 60 bulan	83.16		
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis, 1 tahun	3 jenis 12 bln	240	3 jenis 12 bln	164.4	3 jenis 12 bln	180.84	3 jenis 12 bln	199	3 jenis 12 bln	219	3 jenis 12 bln	241	15 jenis	69.9	DISHUB	
				Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1 unit, 12 bulan	6	1 unit, 12 bulan.	10	1 unit, 12 bulan.	11	1 unit, 12 bulan.	12	1 unit, 12 bulan.	13	1 unit, 12 bulan.	15	5 unit,	69.9	DISHUB	

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		23 kend.	25 Kend.	20.52	25 kendaraan.	20.98	25 kendaraan.	23.078	25 kendaraan.	25	25 kendaraan.	28	25 kendaraan.	31	125 kendaraan.	148.6	DISHU B
Penyediaan jasa kebersihan kantor		5 org, 1 paket	5 org 12 bln ; 1 paket	97.75	5 org 12 bln ; 1 paket	98.97	5 org 12 bln ; 1 paket	108.867	5 org 12 bln ; 1 paket	120	5 org 12 bln ; 1 paket	132	5 org 12 bln ; 1 paket	145	25 org 60 bln ; 5 paket	701.97	DISHU B
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		1 thn	1 jenis	3	1 jenis.	3.6	1 jenis.	3.96	1 jenis.	4	1 jenis.	5	1 jenis.	5	5 jenis.	24.98	DISHU B
Penyediaan alat tulis kantor		1 thn	1 paket	10	1 paket, 1 tahun.	10	1 paket, 1 tahun.	11	1 paket, 1 tahun.	12	1 paket, 1 tahun.	13	1 paket, 1 tahun.	15	5 paket, 5 tahun.	71.05	DISHU B
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		3 paket, 1 tahun	3 paket (5600 buku uji dan 20000 plat uji. 1 paket karcis, paket cetakan); 1 paket	212.38	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji; 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	310	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji; 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	341	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji; 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	375	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji; 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	413	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji; 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	454	15 paket (28.000 buku uji dan 10.000 plat uji; 5 paket karcis dan formulir; 5paket cetakan)	2,104.96	DISHU B
Penyediaan komponen instalasi listrik/penyerangan bangunan kantor		4 jenis, 1 tahun	4 jenis	7	4 jenis	10	4 jenis	11	4 jenis	12	4 jenis	13	4 jenis	15	20 jenis	68.05	DISHU B
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 tahun	0	0		0	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	4 tahun	80	DISHU B
Penyediaan Peralatan rumah tangga		1 tahun	0	0		0	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	4 tahun	20	DISHU B

				Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		2 jenis, 1 tahun	2 jenis, 12 bulan	3.5	2 jenis, 12 bulan	3.5	2 jenis, 12 bulan	3.85	2 jenis, 12 bulan	4	2 jenis, 12 bulan	5	2 jenis, 12 bulan	5	10 jenis, 60 bulan	24.87	DISHUB
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	4 tahun	40	DISHUB
				Penyediaan makanan dan minuman		1 tahun	10 jenis, 12 bulan	25	10 jenis, 12 bulan	30	10 jenis, 12 bulan	33	10 jenis, 12 bulan	36	10 jenis, 12 bulan	40	10 jenis, 12 bulan	44	50 jenis, 60 bulan	208.15	DISHUB
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah		1 tahun	170 kali, 1 tahun	167.121	170 kali, 1 tahun	100	170 kali, 1 tahun	110	170 kali, 1 tahun	121	170 kali, 1 tahun	133	170 kali, 1 tahun	146	850 kali, 5 tahun	777.63	DISHUB
				Penyediaan Jasa Keamanan		1 tahun	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	226.28	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	187.4	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	206.14	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	227	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	249	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	274	150 org, 60 bulan, 5 jenis, 60 bulan.	1,370.38	DISHUB
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
				Pembangunan gedung kantor		1 unit	0	0	0	0	1 unit	400	0	0	0	0	1 unit	400			DISHUB
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		1 unit	400	4 unit roda dua			0	0	0	0	0	0	1 unit	400			DISHUB

			Pengadaan perlengkapan gedung kantor		6 jenis (8 dispenser, 1 almari dan 3 AC, 1 amplifier, 1 TV flat, 1 etalase)	120.5		2 jenis (3 TV, 2 kursi)	67.85	1 jenis, 1 keg	74.635	1 jenis, 1 keg	82	1 jenis, 1 keg	90	1 jenis, 1 keg	99	11 jenis (5 keg)	534.73	DISHUB
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		0	0	0	0	0	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	5 tahun	80	DISHUB
			Pengadaan mebeleur		58 unit	35	50 buah	44.5	48.95		54	59	65	58 unit	306.68	DISHUB				
			Pengadaan komputer dan perengkapannya		2 laptop, 2 komputer, 2 smartphone		2 jenis (3 mesin ketik, 8 laptop, 5 printer)	101.4	111.54		123	135	148	2 jenis (3 mesin ketik, 8 laptop, 5 printer)	619.06	DISHUB				
			Pengadaan alat elektronik			0	0	0	0	1 tahun	30	1 tahun	30	1 tahun	30	1 tahun	30	5 tahun	120	DISHUB
			Pengadaan peralatan kerja			0	0	0	0	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	5 tahun	80	DISHUB
			Pengadaan lemari besi dan felling cabinet			0	0	0	0	2 jenis	30	2 jenis	30	2 jenis	30	2 jenis	30	10 jenis	120	DISHUB

			Pembang unan tempat parkir dan area publik kantor			0	0	0	0	1 unit	250	0	0	0	0	0	0	1 unit	250	DISHU B
			Pembang unan pagar dan pembatas lingkung an kantor			0	0	0	0	1 kgt	250	0	0	0	0	0	0	1 kgt	250	DISHU B
			Pemeliha an Rutin/ Berkala Gedung Kantor		1 tahu n	2 gedung	10	2 gedung	10	2 gedung	11	2 gedung	12	2 gedung	13	2 gedung	15	10 gedung	71. 05	DISHU B
			Pemeliha an Rutin/ Berkala Kendaraa n Dinas/Ope rasional		23 kend, 1 tahu n	26 Kendaraan	66	26 kendaraan	30	26 kendaraan	33	26 kendaraan	36	26 kendaraan	40	26 kendaraan	44	130 kendaraan	249 .15	DISHU B
			Pemeliha an Rutin/ Berkala Perlengka pan Gedung Kantor		1 tahu n	3 jenis,1 tahun	5	3 jenis,1 tahun	10	3 jenis,1 tahun	11	3 jenis,1 tahun	12	3 jenis,1 tahun	13	3 jenis,1 tahun	15	15 jenis, 5 tahun	66. 05	DISHU B
			Pemeliha an Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor		1 tahu n	0	0	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	5 tahun	50	DISHU B
			Pemeliha an Rutin/ Berkala Mebeler			1 keg		1 paket	10	1 paket	11	1 paket	12	1 paket	13	1 paket	15	4 paket	61. 05	DISHU B
			Pemeliha an Rutin/ Berkala Komputer dan perlengka pan		1 tahu n	28 unit	34	36 unit	30	36 unit	33	36 unit	36	36 unit	40	36 unit	44	172 unit	217 .15	DISHU B

			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	5 tahun	40	DISHUB
			Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan felling cabinet		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	5 tahun	20	DISHUB
			Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir dan area publik kantor		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	5 tahun	20	DISHUB
			Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	5 tahun	40	DISHUB
			Rehab rutin/berkala sedang/berat gedung kantor		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	5 tahun	40	DISHUB
			Rehab Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	5 tahun	80	DISHUB
			Pemeliharaan rutin/berkala software dan		1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	5 tahun	80	DISHUB

sistem informasi																		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																		
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		1 paket	0	0	0	0	1 paket	150	0	0	0	0	0	0	0	1 tahun	150	DISHU B
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		1 paket	0	0	0	0	1 paket	60	0	0	0	0	0	0	0	1 tahun	60	DISHU B
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
Pendidikan dan pelatihan formal			0	0	0	0	50 orang	60	50 orang	60	50 orang	60	50 orang	60	200 orang	240	DISHU B	
Sosialisasi peraturan perundang-undangan			0	0	0	0	50 orang	100	50 orang	100	50 orang	100	50 orang	100	200 orang	400	DISHU B	
Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD			50 orang	60	50 orang		50 orang	0	50 orang	0	50 orang	0	50 orang	0	250 orang	60	DISHU B	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja																		

			Penyusunan data base perencanaan SKPD		4 laporan	0	0	0	0	1 laporan	10	1 laporan	10	1 laporan	10	1 laporan	10	5 laporan	40	DISHUB
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD		6 dokumen	7 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA,RKAP/DP PA dan Renstra)	57.459	7 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA,RKAP/DP PA dan Renstra)	38.15	7 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA,RKAP/DP PA dan Renstra)	41.965	7 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA,RKAP/DP PA dan Renstra)	46	7 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA,RKAP/DP PA dan Renstra)	51	7 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA,RKAP/DP PA dan Renstra)	56	35 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA,RKAP/DP PA dan Renstra)	290.37	DISHUB
			Penyusunan data base pelaksanaan kegiatan pembangunan tingkat kabupaten		1 kegiatan	0	0	0	0	1 kgt	10	1 kgt	10	1 kgt	10	1 kgt	10	5 kgt	40	DISHUB
	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan																	
			Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum		1 keg	1 kegiatan	66.35	4 kegiatan	30	1 th, 1 keg	33	1 th, 1 keg	36	1 th, 1 keg	40	1 th, 1 keg	44	5 tahun 5 keg.	249.5	DISHUB
			Persentase ketersediaan angkutan umum	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik															

			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu- rambu Lalu Lintas		4 jenis, 10 TL, 2 WL, 1 5 CD, 20 RLL	4 Jenis	100	4 Jenis	50	1 th, 1 keg	55	1 th, 1 keg	61	1 th, 1 keg	67	1 th, 1 keg	73	5 tahun 5 keg.	405 .26	DISHU B	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan marka jalan		1 paket	0	0	0	0	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	50	1 paket	200	DISHU B	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan pagar pengaman jalan		1 paket	0	0	0	0	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	100	1 paket	400	DISHU B	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana &Prasara na Perlintasa n KA		3 set Rig	2 jenis	15	2 jenis	5	2 jenis	5.5	2 jenis	6	2 jenis	7	2 jenis	7	10 jenis	45. 53	DISHU B	
		Prosentase ketersedia an angkutan kota	Program Peningkat an Pelayanan Angkutan	Prosentase ketersedia an angkutan kota																	
			Kegiatan Penyuluha n bagi para Sopir untuk Keselamat an Penumpa ng								0		0		0		0		0	0	DISHU B
			Kegiatan peningkat an disiplin masyarak at mengguna				1 keg	0	0	0	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	120	DISHU B

Ketersediaan angkutan umum	kan angkutan																		
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedian ya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota																	
	Prosentase Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk pada jaringan jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang			2 kali					0		0		0		0	2 kali	0	DISHU B
		Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum		30 kali	30 kali	20	30 kali	15	1 th, 24 keg	16.5	1 th, 24 keg	18	1 th, 24 keg	20	1 th, 24 keg	22	60 kali, 5 tahun 72 keg.	111.58	DISHU B
	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal		2 keg	2 keg 16 hari .2 bus	60	3 kegiatan	60	1 th, 2 keg	66	1 th, 2 keg	73	1 th, 2 keg	80	1 th, 2 keg	88	5 tahun 11 keg	426.31	DISHU B	

		Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum		1 kgt	0	0	0	0	0	1 kgt	60	1 kgt	60	1 kgt	60	1 kgt	60	5 kgt	300	DISHU B
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang																	
		Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah		1 kgt	0	0	0	0	0	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	5 kgt	120	DISHU B
		Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan			1 dokumen	25	1 kegiatan	25	1 th, 1 keg	27.5	1 th, 1 keg	30	1 th, 1 keg	33	1 th, 1 keg	37	5 tahun 5 keg.	177.63	DISHU B	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan			12 bulan	10	1 kegiatan, 12 bulan	10	1 th, 1 keg	11	1 th, 1 keg	12	1 th, 1 keg	13	1 th, 1 keg	15	5 tahun 5 keg.	71.05	DISHU B	

			Facilitasi dPerizian di Bidang Perhubun gan	1 tahun	12 bulan	10	1 kegiatan, 12 bulan	10	1 th, 1 keg	11	1 th, 1 keg	12	1 th, 1 keg	13	1 th, 1 keg	15	5 tahun 5 keg.	71. 05	DISHU B
			Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	2 keg, 30 org	1 kegiatan 5 kali	30			1 th, 1 keg	0	1 th, 1 keg	0	1 th, 1 keg	0	1 th, 1 keg	0	4 keg. 4 tahun	30	DISHU B
			Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada Sopi/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan	2 keg, 20 peserta	2 keg, 20 peserta .. 1 orang	10	1 kegiatan	10	1 th, 1 keg	11	1 th, 1 keg	12	1 th, 1 keg	13	1 th, 1 keg	15	5 tahun, 5 keg.	71. 05	DISHU B
			Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	1 keg	1 kegiatan	25	1 kegiatan	30	1 th, 1 keg	33	1 th, 1 keg	36	1 th, 1 keg	40	1 th, 1 keg	44	5 tahun, 5 keg.	208 .15	DISHU B
			Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Transportasi Jalan							0		0		0		0		0	DISHU B
	Meningkatnya kualitas pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	- Tersedian ya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupate n/kota yang memiliki															

			populasi kendaraan wajib uji perhubungan bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji - Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji															
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kend. Bermotor	2 keg, 1 tahun	1 kegiatan 9 unit	260	1 kegiatan 9 unit	60	1 th, 2 keg	66	1 th, 2 keg	73	1 th, 2 keg	80	1 th, 2 keg	88	5 tahun 10 keg.	626 .31	DISHU B
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Balai Pengujian Kend. Bermotor	1 gedung	1 gedung	20	1 gedung	20	1 th, 1 keg	22	1 th, 1 keg	24	1 th, 1 keg	27	1 th, 1 keg	29	5 tahun 5 keg.	142 .1	DISHU B
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan																
		Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	12 bln	12 bulan, 2 kegiatan	37.6	12 bulan, 2 kegiatan	35	1 th, 2 keg	38.5	1 th, 2 keg	42	1 th, 2 keg	47	1 th, 2 keg	51	5 keg. 5 tahun	251 .28	DISHU B

			Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	-Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR - Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)																
		Prosentase kendaraan umum yang lulus uji emisi	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kend. Bermotor	2 keg, 1 tahun	1 kegiatan 9 unit	260	1 kegiatan 9 unit	60	1 th, 2 keg	66	1 th, 2 keg	73	1 th, 2 keg	80	1 th, 2 keg	88	5 tahun 10 keg.	626 .31	DISHU B	
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Balai Pengujian Kend. Bermotor	1 gedung	1 gedung	20	1 gedung	20	1 th, 1 keg	22	1 th, 1 keg	24	1 th, 1 keg	27	1 th, 1 keg	29	5 tahun 5 keg.	142 .1	DISHU B	
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan																	
			Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	12 bln	12 bulan, 2 kegiatan	37.6	12 bulan, 2 kegiatan	35	1 th, 2 keg	38.5	1 th, 2 keg	42	1 th, 2 keg	47	1 th, 2 keg	51	5 keg. 5 tahun	251 .28	DISHU B	
	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan																	

	a dan fasilitas perhubungan	Prosentase halte yang tersedia di kabupaten	12 Halte, 4 Shelter	1.27	12 Halte, 4 Shelter	50	1 th, 1 keg	55	1 th, 1 keg	61	1 th, 1 keg	67	1 th, 1 keg	73	5 keg. 5 tahun	306.53	DISHUB
		Prosentase tersedia terminal angkutan penumpang yang tersedia di kabupaten															
	Prosentase tersedia terminal angkutan penumpang yang tersedia di kabupaten	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ															
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan	1 Terminal	140	1 Terminal	150	1 th, 3 keg	165	1 th, 3 keg	182	1 th, 2 keg	200	1 th, 2 keg	220	5 tahun 10 keg.	1,055.77	DISHUB
		Kegiatan Penciptaan Disipin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	4 terminal, 7 jenis	10	4 terminal, 7 jenis	5	4 terminal, 7 jenis	5.5	4 terminal, 7 jenis	6	4 terminal, 7 jenis	7	4 terminal, 7 jenis	7	20 terminal, 35 jenis	40.53	DISHUB
		Kegiatan Penciptaan Disipin dan Pemeliharaan	4 terminal, 12 bulan	5	4 terminal, 12 bulan	5	4 terminal, 12 bulan	5.5	4 terminal, 12 bulan	6	4 terminal, 12 bulan	7	4 terminal, 12 bulan	7	20 terminal, 60 bulan	35.53	DISHUB

			Kebersihan di Lingkungan Terminal B																	
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan																	
			Pembangunan Gedung Terminal			100			0		0			0			0	100	DISHU B	
			Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal			0	0	0	0	1 kgt	50	1 kgt	50	1 kgt	50	1 kgt	50	5 kgt	200	DISHU B
			Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal			0	0	0	0	1 kgt	0	1 kgt	0	1 kgt	500	1 kgt	0	1 kgt	500	DISHU B
			Pembangunan sarana parkir			0	0	0	0	1 kgt	0	1 kgt	0	1 kgt	200	1 kgt	0	1 kgt	200	DISHU B
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian			0	0	0	0	1 kgt	20	1 kgt	20	1 kgt	20	1 kgt	20	1 kgt	200	DISHU B
	Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas																	
	Prosentase Ketersediaan rambu-rambu																			

	u lalu lintas		rambu lalu lintas															
			3 jenis (50 rambu 7 WL, 9 cermin tikungan)	2 jenis (280 Rambu R-60, 2 warning Light, 1 trafficlight, 500m markan)	448.871	2 jenis (130 Rambu R-60, 2 warning Light)	450	1 th, 2keg	495	1 th, 2keg	545	1 th, 2keg	599	1 th, 2keg	659	5 tahun 10 keg.	3,196.17	DISHUB
			1 paket, 291 m2	334 m2	108.485	500	87.5	1 th, 2keg	96.25	1 th, 2keg	106	1 th, 2keg	116	1 th, 2keg	128	3 th, 6keg	642.68	DISHUB
			1 paket	1 paket	0	0	0	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	DISHUB
			1 jenis (1 APILL)	2 jenis (6 cermin tikungan, 3 beam Guardrail, 17 counterdown, 23 RPPJ,60 water barrier, 90 traffic count, 50 barikade)	294	2 jenis (6 cermin tikungan, 3 beam Guardrail)	50	1 th, 2keg	55	1 th, 2keg	61	1 th, 2keg	67	1 th, 2keg	73	5 th, 10 keg	599.26	DISHUB
			3 keg	11 orang, 9 bulan	183	3 kegiatan	167	1 th, 2keg	183.7	1 th, 2keg	202	1 th, 2keg	222	1 th, 2keg	245	5 th, 10 keg	1,202.55	DISHUB
			5 kali	2 kali	30	2 kali, 1 kegiatan	45	1 th, 1 keg	49.5	1 th, 1 keg	54	1 th, 1 keg	60	1 th, 1 keg	66	5 th, 5 keg	304.73	DISHUB

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja dengan indikasi yang baik dan menggambarkan kinerja organisasi. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat penting pada saat merencanakan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah tercapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagaimana pada lampiran tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA SASARAN						KONDISI AKHIR (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Ketersediaan Sarana transportasi	%	35	36	40	44	49	55	60	60

Tabel 6.2
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Periode Selanjutnya						Kondisi Akhir Periode 2021
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	70	78	81	83	85	87	90	90
2.	Nilai LKJIP	Nilai	C	C	CC	CC	B	B	B	B
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	35	36	40	44	49	55	60	60

Tabel 6.3
Indikator yang akan dicapai Dinas Perhubungan berdasarkan RPJM

No	Bidang Urusan/ Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1. Perhubungan								
07.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07.2	Rasio Izin Trayek	105	140	150	150	150	150	150
07.3	Jumlah Uji Kir angkutan umum		5.525	5.663	5.807	5.949	6.098	6.098
07.4	Jumlah Terminal Bus Type A	1	1	1	1	1	1	1
07.5	Jumlah Terminal Bus Type B	2	2	2	2	2	2	1
07.6	Jumlah Terminal Bus Type C	5	5	5	5	5	5	6
07.7	Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	7,12	7,15	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

BAB VII

PENUTUP

Untuk dapat mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam bidang perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang menyusun Renstra PD 2016-2021. Renstra PD 2016-2021 memuat Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan Pembangunan dan Indikator Kinerja, serta Pendanaannya.

Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang diharapkan Renstra PD 2016-2021 dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang menjadi acuan keberhasilan suatu PD dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan menetapkan 2 (dua) program prioritas, yaitu :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas. Selanjutnya dapat menjadi salah satu pencapaian RPJMD Kabupaten Pemalang.

Selain hal tersebut Renstra Dinas Perhubungan diharapkan dapat menjadi referensi keberhasilan pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang Perhubungan di Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 27 Mei 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. TUTUKO RAHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198603 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERHUBUNGAN**

PERATURAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050 / 104 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050 / 575/ 2016 TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- Bahwa Rencan Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang diperlukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan tugas dan sekaligus mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - bahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Percepatan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang tentang Penetapa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANGTAHUN 2016 - 2021

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini dijadikan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.

KETIGA : Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 2018 mendasari pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ini,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Pemalang**
Pada tanggal Maret 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PEMALANG



Drs. TUTUKO RAHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 198603 1 005

TABEL TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR RENSTRA OPD TAHUN 2017

RPJMD KAB. PEMALANG			RENSTRA OPD						
MISI	TUJUAN	SASARAN	NO	TUJUAN	NO	INDIKATOR TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah	Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	1	Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	1	Meningkatkan jumlah sarana transportasi	1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan, dan perbaikan sistem manajemen transportasi	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas

Ket :

Isi mengacu pada Renstra OPD Tahun 2016 - 2021 Bab IV

ATEN PEMALANG
96/PP&RB
2017

TARGET (TAHUN)	
Target	Satuan
60	%

TABEL 4.1
TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA SASARAN						KONDISI AKHIR (2021)	
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat	Prosentase ketersediaan angkutan umum	1. Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Prosentase ketersediaan angkutan umum	%	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	
				Prosentase ketersediaan Angkutan Kota	%	18.5	25.538	25.261	24.928	24.743	24.502	24.244	24.244	
				Prosentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk pada jaringan jalan kabupaten/kota	%	18.2424	18.2424	18.2424	18.2424	18.2424	18.2424	18.2424	18.2424	
				Prosentase Angkutan pada Daerah tertinggal	%	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	19.78	
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis pemeriksaan berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji	Kendaraan	4,150	4,740	5,010	5,400	5,800	6,200	6,600	6,600	
				Prosentase kendaraan umum yang lulus uji emisi	%	35	40	45	50	55	60	65	65	
			3. Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase ketersediaan terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	Prosentase halte yang tersedia di kabupaten	%	35	40	45	50	55	60	65	65
					Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
					Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	35	36	40	44	49	55	60	60
			4. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	Nilai AKIP Dishub	Skor	D	C (40)	C (42)	C (43)	CC (51)	CC (53)	B (61)	B (63)

TABEL 4.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2015)	TARGET KINERJA SASARAN						KONDISI AKHIR (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya ketersediaan sarana transportasi umum bagi masyarakat	Prosentase ketersediaan angkutan umum	%	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79
	Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di Kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%	35	36	40	44	49	55	60	60

Tabel 5.1.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
									2016		2017		2018		2019		2020					2021 (Prediksi N+1)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
									Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan	Jutaan				Jutaan	Jutaan
1			2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatkan kemudahan akses transportasi masyarakat			Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Dishub			Skor	D	C (40)		C (42)		C (43)		CC (51)		CC (53)		B (61)		B (63)		DISHUB
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi setiap bulan	bulan	12	12	13,750	12	14,438	12	15,159	12	15,917	12	16,713	12	17,548	60	93,526	DISHUB
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim dan tersampaikan dengan baik	surat	3000 surat	3.500 surat 12 bulan	9.9	3.500 surat 12 bulan	12	3500 surat 12 bulan	13	3500 surat 12 bulan	15	3500 surat 12 bulan	16	3500 surat 12 bulan	18	17.500 surat 60 bulan	83.16	DISHUB
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis	4 jenis, 1 tahun	3 jenis 12 b/n	240	3 jenis 12 b/n	164.4	3 jenis 12 b/n	180.84	3 jenis 12 b/n	199	3 jenis 12 b/n	219	3 jenis 12 b/n	241	15 jenis	69.9	DISHUB
					Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tercukupi	unit		1 unit, 12 bulan	6	1 unit, 12 bulan	10	1 unit, 12 bulan	11	1 unit, 12 bulan	12	1 unit, 12 bulan	13	1 unit, 12 bulan	15	5 unit,	69.9	DISHUB
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor	kendaraan	23 kend.	25 Kend.	20.52	25 kendaraan.	20.98	25 kendaraan.	23.078	25 kendaraan.	25	25 kendaraan.	28	25 kendaraan.	31	125 kendaraan.	148.6	DISHUB
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas jasa pelayanan kebersihan kantor/terminal	orang	5 org, 1 paket	5 org 12 b/n ; 1 paket	97.75	5 org 12 b/n ; 1 paket	98.97	5 org 12 b/n ; 1 paket	108,867	5 org 12 b/n ; 1 paket	120	5 org 12 b/n ; 1 paket	132	5 org 12 b/n ; 1 paket	145	25 org 60 b/n ; 5 paket	701.97	DISHUB
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang diperbaiki	jenis	1 t/hn	1 jenis	3	1 jenis.	3.6	1 jenis.	3.96	1 jenis.	4	1 jenis.	5	1 jenis.	5	5 jenis.	24.98	DISHUB
					Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	paket	1 t/hn	1 paket	10	1 paket, 1 tahun.	10	1 paket, 1 tahun.	11	1 paket, 1 tahun.	12	1 paket, 1 tahun.	13	1 paket, 1 tahun.	15	5 paket, 5 tahun.	71.05	DISHUB
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bahan cetakan, penggandaan, dan publikasi yang tersedia	paket	3 paket, 1 tahun	3 paket (5600 buku uji dan 20000 plat uji, 1 paket karcis, 1 paket cetakan) ; 1 paket	212.38	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji, 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	310	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji, 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	341	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji, 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	375	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji, 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	413	3 paket (5600 buku uji dan 2000 plat uji, 1 paket karcis dan formulir; 1paket cetakan)	454	15 paket (28.000 buku uji dan 10.000 plat uji; 5 paket karcis dan formulir; 5paket cetakan)	2,104.96	DISHUB
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	komponen listrik/penerangan kantor	jenis	4 jenis, 1 tahun	4 jenis	7	4 jenis	10	4 jenis	11	4 jenis	12	4 jenis	13	4 jenis	15	20 jenis	68.05	DISHUB
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	tahun	1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	4 tahun	80	DISHUB
					Penyediaan Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang terpenuhi	tahun	1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	1 tahun	5	4 tahun	20	DISHUB
					Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan berupa surat kabar yang tersedia	jenis	2 jenis, 1 tahun	2 jenis 12 bulan	3.5	2 jenis, 12 bulan	3.5	2 jenis, 12 bulan	3.85	2 jenis, 12 bulan	4	2 jenis, 12 bulan	5	2 jenis, 12 bulan	5	10 jenis, 60 bulan	24.87	DISHUB
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan logistik kantor yang terpenuhi	tahun	1 tahun	0	0	0	0	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	4 tahun	40	DISHUB
					Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman untuk pegawai	jenis	1 tahun	10 jenis, 12 bulan	25	10 jenis, 12 bulan	30	10 jenis, 12 bulan	33	10 jenis, 12 bulan	36	10 jenis, 12 bulan	40	10 jenis, 12 bulan	44	50 jenis, 60 bulan	208.15	DISHUB
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	tahun	1 tahun	170 kali, 1 tahun	167,121	170 kali, 1 tahun	100	170 kali, 1 tahun	110	170 kali, 1 tahun	121	170 kali, 1 tahun	133	170 kali, 1 tahun	146	850 kali, 5 tahun	777.63	DISHUB
					Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah jasa keamanan kantor, terminal dan parkir	orang, paket	1 tahun	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	226.28	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	187.4	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	206.14	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	227	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	249	30 org, 12 bulan, 1 jenis, 12 bulan.	274	150 org, 60 bulan, 1 jenis, 60 bulan.	1,370.38	DISHUB
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana perkantoran yang terpenuhi setiap bulan	bulan	12	12	37,500	12	39,375	12	41,344	12	43,411	12	45,581	12	47,861	60	255,072	DISHUB
					Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor yang terpenuhi	unit	1 unit	0	0	0	0	1 unit	400	0	0	0	0	0	1 unit	400	DISHUB	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpenuhi	unit	1 unit	400	4 unit roda dua			0	0	0	0	0	0	0	1 unit	400	DISHUB	
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor	jenis	6 jenis (8 dispenser, 1 almari dan 3 AC, 1 amplifier, 1 TV flat, 1 etalase)	120.5	2 jenis (3 TV, 2 kursi)	67.85	1 jenis, 1 keg	74,635	1 jenis, 1 keg	82	1 jenis, 1 keg	90	1 jenis, 1 keg	99	11 jenis (5 keg)	534.73	DISHUB	
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	tahun	0	0	0	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	1 tahun	20	5 tahun	80	DISHUB

	Kegiatan Penyuluhan bagi para Sopir untuk Keselamatan Penumpang	Jumlah peserta penyuluhan bagi para sopir orang							0		0		0		0		0	DISHUB	
	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Jumlah kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	kegiatan	1 keg	0	0	0	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	120	DISHUB	
	Prosentase Tersedia anyar angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk pada jaringan jalan Kabupaten/Kota		%	18.2424	18.2424		18.2424		18.2424		18.2424		18.2424		18.2424		18.2424	DISHUB	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang tersedia	%																
	Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang	Jumlah kegiatan temu wicara pengelolaan angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	kegiatan	2 kali					0		0		0		0	2 kali	0	DISHUB	
	Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum	Kegiatan operasi disiplin administrasi angkutan umum dalam satu tahun	kegiatan	30 kali	30 kali	20	30 kali	15	1 th, 24 keg	16.5	1 th, 24 keg	18	1 th, 24 keg	20	1 th, 24 keg	22	60 kali, 5 tahun 72 keg.	111.58	DISHUB
	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal	Kegiatan Mudik Gratis Provinsi Jawa Tengah agar dilengkapi satuan dr output kegiatan	kegiatan	2 keg	2 keg 16 hari 2	60	3 kegiatan	60	1 th, 2 keg	66	1 th, 2 keg	73	1 th, 2 keg	80	1 th, 2 keg	88	5 tahun 11 keg	426.31	DISHUB
	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan	kegiatan	1 kgt	0	0	0	0	1 kgt	60	1 kgt	60	1 kgt	60	1 kgt	60	5 kgt	300	DISHUB
	Prosentase angkutan pada daerah tertinggal		%	19.78	19.78		19.78		19.78		19.78		19.78		19.78		19.78	DISHUB	
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	%																
	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	kegiatan	1 kgt	0	0	0	0	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	1 kgt	30	5 kgt	120	DISHUB
	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan	Jumlah dokumen hasil pengumpulan dan analisis evaluasi jaringan trayek angkutan	dokumen	1 dokumen	25	1 kegiatan	25	1 th, 1 keg	27.5	1 th, 1 keg	30	1 th, 1 keg	33	1 th, 1 keg	37	5 tahun 5 keg.	177.63	DISHUB	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	Jumlah siklus kegiatan pengembangan prasarana pelayanan angkutan guna meningkatkan SPM di bidang angkutan	kegiatan	12 bulan	10	1 kegiatan, 12 bulan	10	1 th, 1 keg	11	1 th, 1 keg	12	1 th, 1 keg	13	1 th, 1 keg	15	5 tahun 5 keg.	71.05	DISHUB	
	Facilitasi Perizinan di Bidang Perhubungan	Jumlah perizinan angkutan umum yang diterbitkan	kegiatan	1 tahun	12 bulan	10	1 kegiatan, 12 bulan	10	1 th, 1 keg	11	1 th, 1 keg	12	1 th, 1 keg	13	1 th, 1 keg	15	5 tahun 5 keg.	71.05	DISHUB
	Sosialisasi/ Penyuluhan Keterlibatan Lalu Lintas dan Angkutan	Kegiatan penyuluhan keterlibatan lalu lintas dan angkutan	kegiatan	2 keg, 30 org	1 kegiatan 5 kali	30			1 th, 1 keg	0	1 th, 1 keg	0	1 th, 1 keg	0	1 th, 1 keg	0	4 keg, 4 tahun	30	DISHUB
	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan kepada Sopir/Juru Mudi/Awek Kendaraan Umum Teladan	Pemilihan abdi yasa teladan tingkat Kabupaten	orang	2 keg, 20 peserta	2 keg, 20 peserta .. 1 orang	10	1 kegiatan	10	1 th, 1 keg	11	1 th, 1 keg	12	1 th, 1 keg	13	1 th, 1 keg	15	5 tahun, 5 keg.	71.05	DISHUB
	Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah laporan hasil koordinasi angkutan umum	kegiatan	1 keg	1 kegiatan	25	1 kegiatan	30	1 th, 1 keg	33	1 th, 1 keg	36	1 th, 1 keg	40	1 th, 1 keg	44	5 tahun, 5 keg.	208.15	DISHUB

		Sosialisasi Peningkatan Keselamatan Transportasi Jalan	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan keselamatan transportasi jalan	kegiatan						0		0		0		0		0	DISHUB	
Meningkatnya kualitas pelayanan teknis pemeriksaan	Jumlah kendaraan wajib uji			kendaraan	4150	4740		5010		5400	5800		6200		6600		6600		DISHUB	
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji perhubungan bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	unit																
			Jumlah uji kendaraan bermotor wajib uji	kendaraan																
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kend. Bermotor	Kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan	2 keg, 1 tahun	1 kegiatan 9 unit	260	1 kegiatan 9 unit	60	1 th, 2 keg	66	1 th, 2 keg	73	1 th, 2 keg	80	1 th, 2 keg	88	5 tahun 10 keg.	626.31	DISHUB
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Balai Pengujian Kend. Bermotor	Jumlah Balai pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara	gedung	1 gedung	1 gedung	20	1 gedung	20	1 th, 1 keg	22	1 th, 1 keg	24	1 th, 1 keg	27	1 th, 1 keg	29	5 tahun 5 keg.	142.1	DISHUB
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi)	%																
		Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Jumlah kendaraan yang di uji KIR	kegiatan	12 bin	12 bulan, kegiatan 2	37.6	12 bulan, 2 kegiatan	35	1 th, 2 keg	38.5	1 th, 2 keg	42	1 th, 2 keg	47	1 th, 2 keg	51	5 keg, 5 tahun	251.28	DISHUB
		Prosentase kendaraan umum yang lulus uji emisi		%	35	40		45		50	55		60		65		65		DISHUB	
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR	kendaraan																
			Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit																
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kend. Bermotor	Kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	kegiatan	2 keg, 1 tahun	1 kegiatan 9 unit	260	1 kegiatan 9 unit	60	1 th, 2 keg	66	1 th, 2 keg	73	1 th, 2 keg	80	1 th, 2 keg	88	5 tahun 10 keg.	626.31	DISHUB
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Balai Pengujian Kend. Bermotor	Jumlah Balai pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara	gedung	1 gedung	1 gedung	20	1 gedung	20	1 th, 1 keg	22	1 th, 1 keg	24	1 th, 1 keg	27	1 th, 1 keg	29	5 tahun 5 keg.	142.1	DISHUB
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase kendaraan umum yang memenuhi ambang batas emisi gas buang (lulus uji emisi)	%																
		Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi guna Keselamatan Penumpang	Jumlah kendaraan yang di uji KIR	kegiatan	12 bin	12 bulan, kegiatan 2	37.6	12 bulan, 2 kegiatan	35	1 th, 2 keg	38.5	1 th, 2 keg	42	1 th, 2 keg	47	1 th, 2 keg	51	5 keg, 5 tahun	251.28	DISHUB
Meningkatnya infrastruktur, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Prosentase halte yang tersedia di kabupaten			%	35	40		45		50	55		60		65		65		DISHUB	
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte	Jumlah halte yang terpelihara	halte		12 Halte, 4 Shelter	127	12 Halte, 4 Shelter	50	1 th, 1 keg	55	1 th, 1 keg	61	1 th, 1 keg	67	1 th, 1 keg	73	5 keg, 5 tahun	306.53	DISHUB
Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di kabupaten	100%	Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang tersedia di kabupaten		%	100	100		100		100	100		100		100		100		DISHUB	
		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah terminal bis	unit																
			Jumlah orang melalui terminal perbulan	orang																
		Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Jumlah terminal yang terpelihara	terminal	1 terminal	1 Terminal	140	1 Terminal	150	1 th, 3 keg	165	1 th, 3 keg	182	1 th, 2 keg	200	1 th, 2 keg	220	5 tahun 10 keg.	1,055.77	DISHUB

				Kegiatan Pencapaian Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal A	Jumlah terminal yang terpelihara	terminal	4 terminal, 7 jenis	4 terminal, 7 jenis	10	4 terminal, 7 jenis	5	4 terminal, 7 jenis	5.5	4 terminal, 7 jenis	6	4 terminal, 7 jenis	7	4 terminal, 7 jenis	7	20 terminal, 35 jenis	40.53	DISHUB
				Kegiatan Pencapaian Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal B	Jumlah terminal yang terpelihara	terminal	4 terminal, 1 tahun	4 terminal, 12 bulan	5	4 terminal, 12 bulan	5	4 terminal, 12 bulan	5.5	4 terminal, 12 bulan	6	4 terminal, 12 bulan	7	4 terminal, 12 bulan	7	20 terminal, 60 bulan	35.53	DISHUB
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Presentase tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam	%																
					Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam	%																
				Pembangunan Gedung Terminal	Kegiatan pengurangan terminal angkutan barang	kegiatan			100		0		0		0		0		0		100	DISHUB
				Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Pembangunan halte bus, taxi dan gedung terminal yang terpenuhi	kegiatan	1 kgt		0	0	0	1 kgt	50	1 kgt	50	1 kgt	50	1 kgt	50	5 kgt	200	DISHUB
				Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal	Pembangunan jembatan penyebrangan gedung terminal yang terpenuhi	kegiatan	1 kgt		0	0	0	1 kgt	0	1 kgt	0	1 kgt	500	1 kgt	0	1 kgt	500	DISHUB
				Pembangunan sarana parkir	Pembangunan sarana parkir yang terpenuhi	kegiatan	1 kgt		0	0	0	1 kgt	0	1 kgt	0	1 kgt	200	1 kgt	0	1 kgt	200	DISHUB
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian	kegiatan	1 kgt		0	0	0	1 kgt	20	1 kgt	20	1 kgt	20	1 kgt	20	1 kgt	200	DISHUB
Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	60%			Prosentase Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	%	35	36		40		44		49		55		60		60	60	DISHUB
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas	%																
					Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas	%																
				Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	jenis	3 jenis (50 rambu 7 WL, 9 cermin ikungan)	2 jenis (280 Rambu R-60, 2 warning Light, 1 trafflight, 500m marka)	448.871	2 jenis (130 Rambu R-60, 2 warning Light)	450	1 th, 2keg	495	1 th, 2keg	545	1 th, 2keg	599	1 th, 2keg	659	5 tahun 10 keg	3,196.17	DISHUB
				Pengadaan Marka Jalan	Jumlah pengadaan marka jalan	paket	1 paket, 291 m ²	334 m ²	108.485	500	87.5	1 th, 2keg	96.25	1 th, 2keg	106	1 th, 2keg	116	1 th, 2keg	128	3 th, 6keg	642.68	DISHUB
				Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan	paket	1 paket	1 paket	0	0	0	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	1 paket	160	DISHUB
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan	Jumlah sarana dan prasarana perlengkapan jalan	jenis	1 jenis (1 APILL)	2 jenis (6 cermin ikungan, 3 beam Guardrail, 17 countdown, 23 RPPJ, 60 water barrier, 90 traffic count, 50 barikade)	294	2 jenis (6 cermin ikungan, 3 beam Guardrail)	50	1 th, 2keg	55	1 th, 2keg	61	1 th, 2keg	67	1 th, 2keg	73	5 th, 10 keg	599.26	DISHUB
				Pengendalian dan pengamanan lalu lintas di jalan	Jumlah petugas pengamanan kegiatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas jalan	kegiatan	3 keg	11 orang, 9 bulan	183	3 kegiatan	167	1 th, 2keg	183.7	1 th, 2keg	202	1 th, 2keg	222	1 th, 2keg	245	5 th, 10 keg	1,202.55	DISHUB
				Koordinasi dalam Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah laporan hasil koordinasi dalam pengendalian dan pengamanan lalu lintas	kegiatan	5 kali	2 kali	30	2 kali, 1 kegiatan	45	1 th, 1 keg	49.5	1 th, 1 keg	54	1 th, 1 keg	60	1 th, 1 keg	66	5 th, 5 keg	304.73	DISHUB